



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs  
2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan  
Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko  
Widodo I (2014-2019)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Kathleen Mintarja

2016330174

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs  
2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan  
Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko  
Widodo I (2014-2019)**

Skripsi

Oleh

Kathleen Mintarja

2016330174

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis




**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Kathleen Mintarja  
Nomor Pokok : 2016330174  
Judul : Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs 2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 22 November 2019  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**  
Sapta Dwikardana, Ph. D.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**  
Giandi Kartasmita, S. IP., M.A.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**  
Dr. A. Irawan Justiniarto H.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kathleen Mintarja

NPM : 2016330174

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs 2030  
Terkait Ketahanan Pangan melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan  
Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2020



Kathleen Mintarja

2016330174

## ABSTRAK

Nama : Kathleen Mintarja  
NPM : 2016330174  
Judul : Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs 2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan target ketahanan pangan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, melalui pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. Berangkat dari tujuan tersebut, penelitian ini mengambil pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo I dalam pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai target SDGs 2030 terkait ketahanan pangan?” Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan tiga konsep yaitu kepentingan nasional, tiga pilar ketahanan pangan nasional, dan indikator pemenuhan ketahanan pangan yang dimuat di dalam target SDGs 2030 poin ke-2 dan 14. Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang melandasi upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sektor kelautan dan perikanan. Kemudian, tiga pilar ketahanan pangan nasional dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis apa saja upaya yang telah dilakukan oleh KKP demi mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan standar nasional. Terakhir, indikator pemenuhan ketahanan pangan dalam target SDGs 2030 poin ke-2 dan 14 merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menyelaraskan upaya pemenuhan ketahanan pangan nasional dengan target pembangunan global sebagaimana yang telah diatur oleh SDGs 2030. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa KKP mengacu kepada tiga misi pembangunan dalam menyusun program dan kebijakan, yakni; (1) kedaulatan; (2) keberlanjutan; (3) dan kesejahteraan. Program dan kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan nasional, meningkatkan akses fisik maupun ekonomi demi mempermudah keterjangkauan sumber daya kelautan dan perikanan bagi masyarakat, serta mendorong konsumsi produk kelautan dan perikanan demi memenuhi kebutuhan pangan dan gizi nasional.

Kata kunci: Ketahanan pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Indonesia, Sektor Kelautan dan Perikanan, Target SDGs 2030

## ABSTRACT

Nama : Kathleen Mintarja  
NPM : 2016330174  
Judul : *The Effort of Indonesian Government into Achieving SDGs 2030 on Food Security Through the Utilization of Marine and Fisheries Sector Under Joko Widodo's Administration I (2014-2019)*

---

*The objective of this research is to describe the effort of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) during President Joko Widodo's Administration (2014-2019) in achieving food security as stated in the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, through the utilization of the marine and fisheries sector. Proceeding from that objective, this research has the following research question "how is the effort of the Indonesian Government during Joko Widodo's administration in utilizing the marine and fisheries sector to achieve SDGs 2030 target on food security?" To answer the research question, the author use three concepts which are the national interest, three pillars of national food security, and the indicators of food security that are included in the 2<sup>nd</sup> and 14<sup>th</sup> points of SDGs 2030. The concept of national interest is used to analyze the factors that underlie the Government of Indonesia's effort in achieving food security through the utilization of the marine and fisheries sector. Then, the three pillars of national food security are used as a guideline on analyzing the effort of the MMAF to achieve food security in accordance with national standard. Finally, the indicators of food security as listed on the 2<sup>nd</sup> and 14<sup>th</sup> point of the SDGs 2030 measure how successful is the MMAF on aligning the national effort with the global target of sustainable development. Through this research, the author has found the fact that the MMAF is referring to three visions of development to formulate their programs and policies, which are: (1) sovereignty; (2) sustainability; and (3) prosperity. These programs and policies aim to increase the availability of Indonesia's marine and fisheries resources, improve physical and economic access to further facilitate the accessibility of marine and fisheries product for the society, and boost the rate of consumption of marine and fisheries product in order to fulfill the national dietary and nutritional needs.*

*Keywords : Food Security, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesian Government, Marine Affairs and Fisheries, SDGs 2030*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian akhir yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs 2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)”.

Pada penelitian akhir ini, penulis berupaya untuk mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo I dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. Besar harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada studi Ilmu Hubungan Internasional, terutama studi Ekonomi dan Politik Internasional dan Ekonomi Politik Sumber Daya di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan akademik dalam menempuh Program Strata-1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa bahwa penelitian akhir ini masih belum sempurna dan memiliki kelemahan dalam mengkaji permasalahan secara memadai dan komprehensif. Maka dari itu, penulis terbuka akan saran, kritik, maupun rekomendasi yang dapat melengkapi penelitian akhir ini. Kontribusi dari pihak-pihak terkait dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian akhir ini.

Bandung, 9 Januari 2020

Peneliti,

Kathleen Mintarja

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia terlibat dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian akhir ini. Penulis sangat menghargai segala bentuk kontribusi dan partisipasi yang telah diberikan, dan besar harapan penulis jika penulis dapat membalas setiap budi pihak-pihak yang terkait. Oleh sebab itu, penulis hendak menyatakan rasa syukur dan doa kepada setiap dari mereka yaitu:

Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, hikmat, dan teladan-Nya yang selalu menyertai penulis pada masa senang maupun sulit selama proses perkuliahan penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan penulis selain terima kasih atas penyertaan dan kesempatan yang diberikan oleh-Nya, sehingga penulis mendapatkan pembelajaran berharga untuk diterapkan kepada tahap kehidupan penulis yang selanjutnya.

Kepada orang tua penulis, Rico dan Erna, yang selalu memberikan dukungan materi dan imateri kepada penulis sedari dini hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan tiada henti agar penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Kepada adik penulis, Nicholas, terima kasih atas dukungan dan kesabarannya dalam menghadapi penulis. Semoga sehat selalu, cita-cita tercapai, dan selalu berada didalam perlindungan Tuhan.

Dosen pembimbing, Mas Giandi, yang telah menginspirasi penulis untuk mengambil mata kuliah yang diajarkan oleh Mas Gi sebagai rujukan topik skripsi penulis. Terima kasih untuk dukungan dan dorongan yang telah Mas Gi berikan agar penulis selesai tepat waktu. Semoga Mas Gi sehat selalu dan apapun yang diinginkan dapat tercapai.

Super Ambis, teman-teman penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian penelitian akhir ini -- Kezia Gabrielle, Priscilia Christian Kadim, Stella Claresta Alexander. Terima kasih atas segala hal yang telah dilewati bersama-sama dengan penulis, kalian adalah salah satu hal terbaik yang penulis temukan selama berkuliah di Kampus Tiga. Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan kalian. Kalian merupakan orang-orang yang tidak henti menyemangati penulis bahkan di masa-masa terendah penulis. Penulis berharap bahwa masing-masing dari kalian dapat mewujudkan apa yang kalian inginkan, Tuhan memberkati.

Teman-teman penulis sejak masa SMP dan SMA, Bonding's Time – Kezia, Caroline, Deborah, Angel, J.LACK – Caroline, Kesha, Jovie, Angel, terima kasih karena telah menjadi tempat penulis 'pulang' selama penulis berkuliah di Bandung. Meskipun kini semua memiliki kesibukan masing-masing, penulis berharap agar pertemanan dengan kalian tidak akan pernah berakhir.

Teruntuk Ring 1 KBI-2 teman-teman penulis sejak pemilihan KBI hingga proses penulisan penelitian akhir – Richard Theo dan Stella Claresta. Terima kasih untuk segala pengalaman nugas di cafe-cafe sekitar Bandung. Terima kasih untuk



segala proses yang telah kita lewati bersama-sama, sejak seminar hingga bab terakhir skripsi. Untuk segala keambisan akademis kita, dan untuk menjadi orang-orang yang bisa penulis andalkan selama kuliah. Penulis tidak akan dapat menjadi seperti sekarang tanpa adanya campur tangan dari kalian berdua. Semoga kita bisa selalu *stay in contact*, dan keambisan kita terbayarkan di dunia kerja nanti Amin.

Geng Samchan yang telah mengisi hari-hari penulis selama proses magang di KBRI Thailand dengan canda tawa dan pengalaman-pengalaman unik lainnya – Jessica VK, Stella, dan Priscilia. *Special Thanks* juga penulis haturkan kepada Bangkok Oasis Hotel yang telah menampung kami selama hampir sebulan. Semoga perjalanan magang kemarin bukan menjadi cerita konyol kita yang terakhir, Tuhan memberkati.

Kepada seluruh rekan-rekan kepanitiaan penulis selama berkuliah di Kampus Tiga – TAHI 2016, Gintre 2017, TED x Unpar 2019, Unpar Ambassador, dll. Terima kasih karena telah berpartisipasi dalam proses pendewasaan penulis hingga saat ini. Masing-masing dari kalian memiliki peran dalam proses pendewasaan penulis selama berkuliah di Kampus Tiga. Penulis berharap bahwa semua dari kalian akan sukses di bidangnya masing-masing.

Mas Kawin Inti HMPSIHI 2017/2018 – Nindyo, Baban, Defta, Andin, Andri, dan Stella. Terima kasih atas kepercayaannya kepada penulis dan Stella. Menjadi bagian dari Mas Kawin merupakan masa-masa yang tidak akan pernah penulis lupakan. Terima kasih kepada Nindyo yang telah mempercayakan posisi bendahara kepada penulis. Terima kasih kepada ‘Dad’ Andri atas kesempatannya dan kesabarannya dalam membimbing penulis. Terima kasih kepada ‘Mom’ Andin atas kerempongan dan pesan-pesan hidupnya. Terima kasih kepada Defti dan Baban atas kesabaran dan supportnya kepada penulis selama masa-masa awal menjadi bagian dari himpunan. Terima kasih karena telah menjadi salah satu keluarga terdekat penulis di Kampus Tiga. Sukses selalu untuk kalian.

Inti HMPSIHI 2018/2019 – Kenken, Belldom, Ferry, Cheryl, dan Kezia. Terima kasih sudah mengisi tahun terakhir penulis dalam himpunan dengan segala canda tawa, julid, dan rapat-rapat divisi. Terima kasih untuk waktu yang telah kalian curahkan untuk himpunan, ditengah kerepotan dan kesibukan kalian di luar HMPSIHI. Untuk Kenken, Belldom, dan Ferry, terima kasih untuk dedikasi yang kalian berikan kepada HMPSIHI, untuk Cheryl dan Kezia terima kasih karena telah menjadi anak yang sabar, pintar, dan pengertian. Sukses selalu untuk kita semua.

Divisi *Rules of Procedure* Praktik Diplomasi 2017 dan 2018. Terima kasih kepada ROP 2017 – Chika, Henmul, Yuma, Nindyo, Santi, Sharon – atas segala bimbingan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu melewati tahun-tahun awal di Kampus Tiga dengan baik. Menjadi bagian dari ROP merupakan salah satu kesempatan yang penulis syukuri dan sangat berpengaruh kepada jalan penulis di Kampus Tiga. Terima kasih untuk segala pembelajarannya. Kepada ROP 2018 – Rahma, Leo, Lady, Flo, Richard, Ezra, Nadia, Nabilla, Liony, penulis bersyukur telah memiliki kalian sebagai anggota ROP. Sukses selalu dalam apapun yang ingin kalian capai, Tuhan memberkati.

Teruntuk Chevalier Mentor 2018, terima kasih sudah mau menerima penulis menjadi bagian dari keluarga mentor. Menjadi bagian dari mentor adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah penulis ambil selama berkuliah di Kampus Tiga. Terima kasih untuk segala cerita selama rangkaian KKM, GM, hingga OSFAK dan Bakti Desa. Penulis berharap bahwa segala pengalaman tersebut dapat menjadi cerita-cerita yang akan selalu dikenang saat kita semua berkumpul kembali nanti.

Inti Chevalier Mentor 2019 – Richard, Adelia, Anne, Danan, dan Savitri. Terima kasih telah mempercayakan posisi sekben kepada penulis. Untuk segala canda tawa dan air mata yang kita lewati selama hampir satu tahun berproses bersama. Meskipun kita baru dipertemukan pada awal tahun 2019, penulis telah menganggap kalian sebagai salah satu keluarga dan *hardest goodbye* di Kampus Tiga. Meskipun setelah ini kita akan memiliki jalan masing-masing, penulis berharap agar kedekatan kita tidak hanya sebatas kepanitiaan kampus saja.

Chevalier Mentor 2019, sebuah keputusan yang tepat untuk mengakhiri segala kegiatan kepanitiaan penulis di Kampus Tiga bersama kalian. Terima kasih atas segala pembelajaran berharga yang telah kalian berikan kepada penulis, terima kasih atas kesediaannya menjadi keluarga penulis selama masa-masa penutup cerita penulis dalam Kampus Tiga.

Delegasi Prakdip Yudhalicious yang telah berproses bersama selama hampir satu tahun untuk Praktik Diplomasi 2019 – Richard, Alanna, Stella, VK, Naya, Nabilla, Kezia, Yudha, Ezra, dan Priscilia. Terima kasih untuk satu tahun penuh canda tawa, kegiatan bonding seperti kuliner dan karaokean saat delegasi lain panik. Penulis menyadari bahwa delegasi kita ‘dirumorkan’ sangat serius, hingga gosip latihan di Punclut pun tersebar.. Hanya Tuhan dan kita yang tahu betapa ‘serius’nya kita dalam menghadapi prakdip. Terima kasih kepada ‘Mawar’ yang secara tidak langsung telah mempertemukan kita semua. Kalian adalah satu-satunya hal yang penulis syukuri selama mengikuti rangkaian prakdip 2019. Penulis tidak menyesal telah memilih untuk menjalani proses yang amat panjang selama Prakdip bersama kalian. Ayo tetap aktifkan IG yudhalicious!

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>5</b>
1.2.1. Pembatasan Masalah .....	9
1.2.2. Perumusan Masalah .....	10
<b>1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>1.4. Kajian Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>17</b>
<b>1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>28</b>
1.6.1. Metode Penelitian.....	28
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
<b>BAB II INDONESIA DAN KETAHANAN PANGAN DALAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN .....</b>	<b>32</b>
<b>2.1. Definisi dan Urgensi Ketahanan Pangan dalam Ranah Global.....</b>	<b>32</b>
<b>2.2. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Ketahanan Pangan Global .....</b>	<b>38</b>
<b>2.3. Tinjauan Umum Ketahanan Pangan di Indonesia .....</b>	<b>40</b>
<b>2.4. Kerangka Hukum Ketahanan Pangan di Indonesia.....</b>	<b>45</b>
<b>2.5. Profil Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia.....</b>	<b>49</b>
2.5.1. Potensi Pencapaian Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan .....	50

2.5.2. Tantangan dan Hambatan bagi Pencapaian Ketahanan Pangan dalam Sektor Kelautan dan Perikanan .....	51
<b>2.6. Fokus Pemerintah Indonesia dalam Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Sektor Kelautan dan Perikanan Sesuai Target SDGs 2030</b>	<b>57</b>
<b>BAB III KOMITMEN INDONESIA TERHADAP TARGET SDGS 2030 DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DALAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA.....</b>	<b>65</b>
<b>3.1.Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.....</b>	<b>65</b>
3.1.1. Pilar Kedaulatan.....	65
3.1.2. Pilar Keberlanjutan.....	70
3.1.3. Pilar Kesejahteraan.....	73
<b>3.2.Kerja Sama Internasional .....</b>	<b>82</b>
3.2.1. Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO).....	82
3.2.2. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Kerjasama Regional <i>Coral Triangle Initiatives on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security</i> (CTI-CFF) untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional .....	86
<b>3.3.Capaian Ketahanan Pangan Nasional Melalui Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Memenuhi Indikator SDGs Poin ke-2 (<i>Zero Hunger</i>) ...</b>	<b>92</b>
3.3.1. Kebijakan dalam Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mengatasi Permasalahan Malnutrisi dan Kelaparan.....	93
<b>3.4.Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia Melalui Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Memenuhi Indikator SDGs Poin ke-14 (<i>Life Below Water</i>)</b>	<b>100</b>
3.4.1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam Menjaga Jumlah Persediaan Ikan Dalam Batas Biologis yang Aman (Indikator 14.4.1.) .....	101
3.4.2. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam Memberantas Praktik IUU <i>Fishing</i> (Indikator 14.6.1. A) .....	103
3.4.3. Perikanan Berkelanjutan Sebagai Presentase dari PDB Pada Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil, Negara-Negara Berkembang, dan Semua Negara (Indikator 14.7.1.).....	106
3.4.4. Akses Terhadap Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Kemiskinan Bagi Perikanan Skala Kecil (Indikator 14 b.1.) .....	108
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.4. 1 Strategi Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas KKP.. 59

Tabel 2.4.1. 1 Tiga Pilar Misi KKP ..... 61

Tabel 2.4.2. 1 PP Nomor 13 Tahun 2017..... 62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5. 1 Operasionalisasi Kerangka Pemikiran .....	17
Gambar 3.3.1. 1 Grafik Produksi Perikanan Tangkap (2014-2018) .....	94
Gambar 3.3.1. 2 Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Tanpa Rumput Laut) 2014-2018 .....	95
Gambar 3.3.1. 3 Grafik Angka Konsumsi Ikan Dalam Negeri (2015-2018).....	97
Gambar 3.3.1. 4 Grafik Proporsi Status Stunting dan Gizi Buruk Pada Balita di Indonesia (2013-2018) .....	99
Gambar 3.4.1. 1 Grafik Angka Potensi Sumber Daya Ikan (MSY) di Indonesia (Juta ton/tahun).....	102
Gambar 3.4.3. 1 Grafik Pertumbuhan PDB Sektor Perikanan (2014-2018).....	107
Gambar 3.4.3. 2 Grafik Nilai Tukar Rata-Rata di Sektor Perikanan (2014-2018) .....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dinamika isu keamanan di dalam dunia internasional telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pasca Perang Dunia II, muncul berbagai bentuk permasalahan baru, sehingga menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang definisi dari isu keamanan itu sendiri. Salah satu isu yang menjadi prioritas utama bagi negara-negara di masa modern adalah mengenai kesejahteraan manusia, contohnya permasalahan pangan.<sup>1</sup> Signifikansi permasalahan pangan terhadap kesejahteraan manusia merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, mengingat upaya untuk menangani permasalahan tersebut masih jauh dari kata optimal. Hingga tahun 2018, estimasi jumlah manusia yang mengalami krisis pangan adalah 124 juta jiwa yang tersebar di 51 negara berbeda.<sup>2</sup>

Karena sifatnya yang kompleks dan transnasional, negara-negara menyadari pentingnya kerjasama internasional dalam menangani permasalahan pangan secara maksimal. Berbagai upaya digiatkan untuk menyelesaikan permasalahan pangan, salah satunya adalah membentuk organisasi pangan Food and Agriculture Organization atau dikenal sebagai FAO yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

---

<sup>1</sup> Food and Agriculture Organization, "About FAO" , diakses 7 Februari 2019 dari <http://www.fao.org/about/en/>

<sup>2</sup> World Food Programme, 2018, "2018 Global Report on Food Crises," diakses 7 Maret 2019 dari <https://www.wfp.org/content/global-report-food-crises-2018>

Pada tahun 1996, FAO menjadi fasilitator *World Food Summit* yang diselenggarakan di Roma, Italia.<sup>3</sup> Konferensi ini membahas beberapa persoalan mendasar terkait isu pangan, salah satunya adalah topik ketahanan pangan. Dalam konferensi tersebut, dibuat sebuah definisi universal mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan menurut *World Food Summit* adalah kondisi dimana semua manusia, dalam keadaan apapun, memiliki akses fisik maupun ekonomi terhadap makanan yang aman, bernutrisi, serta mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.<sup>4</sup>

Komitmen dunia internasional untuk mewujudkan ketahanan pangan kemudian dituangkan dalam salah satu target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi 17 poin SDGs 2030, yaitu paduan bagi komunitas internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang.<sup>5</sup> SDGs 2030 merupakan pembaharuan komitmen negara-negara yang sebelumnya dimuat dalam *Millennium Development Goals* (MDGs). Agenda SDGs 2030 menawarkan pendekatan yang unik, transformatif, dan integratif untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia, dimana tidak ada satu orangpun yang tertinggal. Selain 17 poin utama, SDGs 2030 memuat 169 target dan 230 indikator keberhasilan yang disusun secara komprehensif guna merealisasikan pembangunan berkelanjutan serta memastikan bahwa tidak ada satu manusiapun yang tertinggal (*no one left behind*).<sup>6</sup> Salah satu tujuan utama dari

---

<sup>3</sup> FAO, 1996, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*, diakses 20 Februari 2019 dari <http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm>

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid hlm. 5.

<sup>6</sup> United Nations Committee for Development Policy, 2018, *Leaving No One Behind*, diakses 20 Februari 2019 dari



target SDGs 2030 adalah memberantas kemiskinan, kelaparan, serta mewujudkan ketahanan pangan.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi ketahanan pangan, contohnya melalui pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. Selama ini, konsep ketahanan pangan yang dikenal secara umum cenderung dikaitkan dengan sektor agraris, sehingga sektor kelautan dan perikanan tidak mendapatkan perhatian yang proporsional.<sup>8</sup> Hal ini dibuktikan dengan sumbangan sektor perikanan terhadap ketahanan pangan masih sedikit apabila dibandingkan dengan sektor agraris, yaitu sebesar 15 hingga 20 persen di dunia.<sup>9</sup> Hal ini sangat disayangkan, mengingat sektor perikanan memberi kontribusi sebesar lebih dari 50% dari total konsumsi protein hewani.<sup>10</sup> Ditambah lagi, tren konsumsi ikan dunia terus menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun ke belakang.<sup>11</sup>

Dilansir dari laporan *The State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA) 2018, sektor perikanan laut dan budidaya merupakan kunci utama bagi ketahanan pangan dalam pembangunan berkelanjutan untuk mencapai target SDGs 2030. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa sektor perikanan laut dan budidaya memiliki relevansi dengan sembilan poin dalam SDGs 2030. Menyadari pentingnya pengembangan konsep pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, agenda

---

[https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2754713\\_July\\_PM\\_2\\_Leaving\\_no\\_one\\_behind\\_Summary\\_from\\_UN\\_Committee\\_for\\_Development\\_Policy.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2754713_July_PM_2_Leaving_no_one_behind_Summary_from_UN_Committee_for_Development_Policy.pdf)

<sup>7</sup> FAO, "Sustainable Development Goals," diakses 20 Februari 2019 dari <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/jp/>

<sup>8</sup> Singgih Tri Sulistiyono, 2012, "Sumber Daya Pangan Bahari Dalam Perspektif Sejarah," *HUMANIKA* Vol. 15 no. (9) hlm. 2.

<sup>9</sup> FAO, "Fish and Food Security," diakses 9 Februari, 2019, <http://www.fao.org/focus/e/fisheries/intro.htm>.

<sup>10</sup> Bappenas, 2013, "Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019," 28 Januari, 2013, hlm.1-32.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 4.

SDGs 2030 memadukan dua poin penting yang memiliki keterkaitan langsung dengan target ketahanan pangan melalui sektor kelautan dan perikanan, yaitu SDGs 2030 poin ke-2 (*Zero Hunger*) dan poin ke-14 (*Life Below Water*).

Target *Zero Hunger* dibuat dengan tujuan memberikan akses bagi masyarakat, terutama yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, untuk makanan yang mampu meningkatkan derajat hidup mereka.<sup>12</sup> Diharapkan pada tahun 2030, seluruh manusia dapat memiliki akses terhadap makanan yang aman, bernutrisi, dan cukup untuk setiap harinya. Target *Life Below Water* berbicara mengenai pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Kedua poin tersebut menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas produsen makanan berskala kecil, sekaligus memastikan praktik produksi makanan yang berkelanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan.<sup>13</sup> Apabila dikelola dengan benar, intensifikasi sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar dalam mengurangi kelaparan, serta memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi populasi yang semakin bertumbuh.<sup>14</sup>

Terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden pada tahun 2014 menjadi katalis bagi transformasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh visi dan misi Presiden Jokowi yang hendak mengembalikan kejayaan maritim Indonesia, termasuk dalam hal ketahanan pangan. Karena peneliti

---

<sup>12</sup> UNDP, "Goal 2: Zero Hunger," diakses 20 Februari 2019 dari <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html>.

<sup>13</sup> FAO, 2016, *Agenda 2030, Sustainable Development Goals, and Fisheries and Aquaculture*, diakses 24 September 2019 dari <http://www.fao.org/3/a-mq652e.pdf>

<sup>14</sup> FAO, 2015, *FAO and the 17 Sustainable Development Goals*, diakses 29 Agustus 2019 dari <http://www.fao.org/3/a-i4997e.pdf>

ingin melakukan kajian dan analisis yang lebih dalam terhadap pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian: "Upaya Pemerintah Indonesia untuk Mencapai Target SDGs dalam Ketahanan Pangan <elalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)"

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Ketahanan pangan menjadi salah satu acuan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menjadikan isu pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk menyelaraskan upaya pembangunan ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

Pemenuhan ketahanan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang notabeneanya adalah negara kepulauan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hingga saat ini Indonesia belum dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pertama, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan. Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Menurut Thomas Malthus, pertumbuhan penduduk memiliki korelasi

---

<sup>15</sup> Sri Nurhemi, Shinta R.I. Soekro, dan Guruh Suryani R, "Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan," *Working Paper Bank Indonesia no.4* (2014) hlm.1-70.

dengan permasalahan kerawanan pangan.<sup>16</sup> Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk diukur mengikuti deret ukur, sedangkan ketersediaan pangan diukur menggunakan deret hitung.<sup>17</sup> Ia memprediksi bahwa di masa depan, overpopulasi akan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan global.

Dalam keadaan yang ideal, pemerintah wajib untuk memastikan bahwa angka produksi pangan melebihi angka pertumbuhan penduduk. Sayangnya, hal ini belum terjadi di Indonesia. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang besar, jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai 273,2 juta jiwa pada tahun 2030 dan 309,4 juta jiwa pada tahun 2050. Pertumbuhan penduduk tersebut diiringi oleh alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian seperti tempat tinggal dan pabrik-pabrik industri. Diperkirakan bahwa tahun 2030, hanya akan tersisa 4,3 juta hektar lahan pertanian di Indonesia.<sup>18</sup>

Ditambah lagi, angka pertumbuhan penduduk yang besar juga tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang juga besar, sehingga banyak penduduk dengan tingkat ekonomi yang rawan belum memiliki akses yang baik terhadap pangan. Akibatnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang harus hidup dalam kerawanan pangan. Dengan menerapkan Teori Malthus, ketersediaan pangan di Indonesia tidak mampu mengimbangi ledakan populasi yang akan terjadi di masa depan.

---

<sup>16</sup> Subejo dan Tatag Handaka, 2013, "Controlling Population, Shaping the Future," *The Jakarta Post*, diakses 14 Oktober 2019 dari <https://www.thejakartapost.com/news/2013/04/20/controlling-population-shaping-future.html>

<sup>17</sup> Thomas Robert Malthus, 1798, *An Essay on the Principle of Population*, (London: J.M. Dent) Hlm. 1-24.

<sup>18</sup> Aria Kesuma, 2015, "Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Ketahanan Pangan Indonesia," *Kompasiana*, diakses 24 September 2019 dari <https://www.kompasiana.com/ariakesuma/55c35d6da223bdd9066c955b/pertumbuhan-penduduk-dan-tingkat-ketahanan-pangan-indonesia?page=all>

Apabila tidak segera ditanggulangi, tidak menutup kemungkinan jika Indonesia akan mengalami krisis pangan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan.<sup>19</sup> Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah seharusnya meningkatkan produksi pangan dan menurunkan angka kemiskinan agar dapat menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Faktor kedua yang menghambat terwujudnya ketahanan pangan adalah penurunan jumlah rumah tangga pertanian akibat fenomena urbanisasi. Menurut Perwakilan FAO di Indonesia, Mark Smulders, urbanisasi memiliki dampak yang sama pentingnya dengan kelaparan. Seiring dengan perkembangan industrialisasi, banyak masyarakat pedesaan yang terdorong untuk tidak lagi melanjutkan usaha pertanian dan memilih untuk melakukan migrasi ke perkotaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga mereka memilih untuk pergi ke kota dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik.<sup>21</sup> Selain urbanisasi, penurunan rumah tangga pertanian juga disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian akibat kompetisi dalam keperluan industri dan perumahan. Saat ini, sebagian besar tanah yang seharusnya dapat dikelola untuk menghasilkan produk agrikultur justru digunakan untuk menanam kelapa sawit dengan alasan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Akibatnya, angka penduduk yang berprofesi di bidang pertanian terus mengecil, sehingga Indonesia harus

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Muhammad Idris, 2016, "Antisipasi Pertumbuhan Penduduk, Produksi Pangan RI Harus Naik 2 Kali Lipat," *Detikfinance*, diakses 22 Oktober 2019 dari <https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-3317556/antisipasi-pertumbuhan-penduduk-produksi-pangan-ri-harus-naik-2-kali-lipat>

<sup>21</sup> Sonia Fitri, 2015, "Urbanisasi Jadi Tantangan Pencapaian Ketahanan Pangan," *Republika*, diakses 22 Oktober 2019 dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/10/15/nw7zlp284-urbanisasi-jadi-tantangan-pencapaian-ketahanan-pangan>

bergantung pada impor sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.<sup>22</sup> Pada tahun 2014, data dari BPS menyebutkan bahwa sebanyak 33 juta pemuda kisaran usia 15-29 tahun tinggal di perkotaan, sedangkan jumlah petani yang berusia di bawah 35 tahun hanya sebesar 12% saja.<sup>23</sup> Apabila tidak segera ditanggulangi, angka migrasi desa ke kota yang semakin tinggi tentu akan mengganggu produksi pangan, yang kemudian berimbas terhadap kegagalan pemenuhan ketahanan pangan nasional.

Dari segi geografis, letak dan luas wilayah Indonesia menyebabkan adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap sumber pangan yang dihasilkan. Hal ini kemudian memberikan dampak negatif terhadap optimalisasi pengelolaan hasil komoditas pangan.<sup>24</sup> Ditambah lagi, distribusi pangan ke pulau-pulau kecil di Indonesia menemukan banyak kendala logistik. Faktor ini menyebabkan harga pangan dalam negeri yang fluktuatif, sehingga menghambat perwujudan ketahanan pangan yang merata dan menyeluruh.<sup>25</sup> Masalah kekurangan pangan masih banyak terjadi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti wilayah Timur Indonesia.

Banyaknya permasalahan multisektor yang dihadapi oleh Indonesia membuat Pemerintah kesulitan untuk mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan target SDGs 2030. Menurut data yang dihimpun oleh FAO, hampir 20 juta warga

---

<sup>22</sup>Arys Aditya, 2018, "JK: Pertumbuhan Penduduk Jadi Tantangan Industri Pangan RI," *CNBC*, diakses 22 Oktober 2019 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180308104825-4-6588/jk-pertumbuhan-penduduk-jadi-tantangan-industri-pangan-ri>

<sup>23</sup> Sonia Fitri, 2015, "Urbanisasi jadi Tantangan Pencapaian Ketahanan Pangan," *Republika*, diakses 22 Oktober 2019 dari <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/10/15/nw7zlp284-urbanisasi-jadi-tantangan-pencapaian-ketahanan-pangan>

<sup>24</sup> Oktavio Nugrayasa, 2015, "Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia," diakses 22 Oktober 2019 dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/tantangan-ketahanan-pangan-indonesia/>

<sup>25</sup> Selfie Miftahul Jannah, 2019, "Masalah Logistik Disebut Masih Jadi Tantangan Ketahanan Pangan RI," *Tirto*, diakses 22 Oktober 2019 dari <https://tirto.id/masalah-logistik-disebut-masih-jadi-tantangan-ketahanan-pangan-ri-dg3D>

Indonesia masih mengalami malnutrisi. Hal ini tentu saja menjadi ironi, mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tidak dapat mengelola kekayaan tersebut secara optimal untuk memenuhi kepentingan negara. Permasalahan ini kembali menegaskan pentingnya peranan pemerintah dalam melakukan inovasi agar dapat mendorong dan menjaga produktivitas sumber daya pangan, demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Penulis akan membatasi penelitian berdasarkan tempat, kurun waktu, aktor, serta lingkup kebijakan. Tempat penelitian dibatasi menjadi satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pembatasan dilakukan terhadap kurun waktu penelitian. Rentang waktu penelitian akan dibatasi dari tahun 2014-2019 karena pada masa tersebut, Indonesia berada dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Penulis berpendapat bahwa visi dan misi Joko Widodo untuk memajukan sektor maritim Indonesia, terutama dalam ketahanan pangan, sesuai dengan pembahasan tulisan. Ruang lingkup kebijakan yang akan diteliti oleh penulis meliputi kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan daerah. Pembatasan ini dilakukan mengingat setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir, aktor yang akan diteliti adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP merupakan lembaga pemerintah Republik Indonesia yang memiliki mandat untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan, sehingga peraturan dan kebijakan yang

dikeluarkan oleh KKP memiliki relevansi terbesar untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan riset: "Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo I dalam pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai target SDGs 2030 terkait ketahanan pangan?"

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Terdapat dua tujuan utama mengapa penelitian ini dilakukan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan terperinci mengenai pentingnya sektor kelautan dan perikanan bagi Indonesia untuk mencapai target ketahanan pangan yang telah ditetapkan *Sustainable Development Goals 2030* poin ke-2 dan 14. Kedua, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan sejauh mana upaya pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo I dalam pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan untuk mengatasi isu ketahanan pangan di Indonesia.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan wawasan dan referensi terkait implementasi kebijakan pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai ketahanan pangan. Adapun penelitian ini juga



diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi institusi-institusi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait sektor kelautan dan perikanan dalam permasalahan ketahanan pangan.

#### **1.4. Kajian Pustaka**

Salah satu bagian penting dalam sebuah penulisan penelitian ilmiah adalah kajian literatur. Kajian literatur bertujuan untuk membatasi permasalahan penelitian, serta menjadi penghubung antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada terlebih dahulu. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji tiga literatur dari sumber-sumber terpercaya dan dianggap memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

Jurnal pertama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah "Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya" karya Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS.<sup>26</sup> Dalam jurnal penelitian tersebut, Suryana berpendapat bahwa Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai negara yang telah mencapai ketahanan pangan. Hal ini disebabkan masih banyak tantangan multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia.

Tantangan bagi ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia berasal dari dua sisi, yaitu sisi penyediaan dan pemenuhan pasokan. Dilihat dari sisi penyediaan, terdapat setidaknya lima hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, ketahanan pangan berkelanjutan terhalang kendala sumber daya alam.

---

<sup>26</sup> Achmad Suryana, 2014, "Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya," *Forum Penelitian Argo Ekonomi* Vol. 32 No(2) Hlm.123-135.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kompetisi pemanfaatan sumber daya alam untuk dijadikan sebagai sumber pangan semakin ketat. Kedua, perubahan iklim global menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Perubahan iklim ekstrim yang dialami Indonesia mempengaruhi produktivitas sektor pangan, sehingga terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>27</sup> Tantangan ketiga dihadapi oleh kondisi pertanian Indonesia yang didominasi oleh usaha berskala kecil yang kesulitan mendapat akses terhadap pasar, informasi, dan teknologi. Keempat, terjadi ketimpangan produksi pangan antar wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia bagian Barat, terutama Pulau Jawa, memproduksi 50% dari pangan nasional. Tantangan ini disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur antara wilayah besar dan kecil di Indonesia. Tantangan terakhir berasal dari persentase kehilangan pangan dan pemborosan pangan yang masih tinggi. Kehilangan pangan (*Food Losses*) terjadi akibat kesalahan dalam penanganan pangan selama proses produksi hingga pengelolaan. Sedangkan pemborosan pangan (*Food Waste*) terjadi ketika masyarakat tidak mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan, sehingga menghasilkan sisa makanan yang seharusnya masih dapat dimakan. Kedua masalah ini masih sering ditemukan di Indonesia.<sup>28</sup> Hingga kini, belum ada program pemerintah yang berhasil menyelesaikan permasalahan yang disebutkan di atas secara tuntas.

Selain sisi penyediaan, terdapat empat tantangan yang dihadapi oleh sisi pemenuhan kebutuhan. Tantangan pertama adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan fenomena urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan

---

<sup>27</sup> Ibid hlm 129.

<sup>28</sup> Ibid. hlm 130.

terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian menjadi dominan perkantoran. Konsekuensi dari tantangan ini adalah semakin tingginya kebutuhan makanan untuk orang-orang yang hidup di perkotaan. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren positif sehingga daya beli masyarakat ikut mengalami kenaikan. Peningkatan pendapatan ikut meningkatkan permintaan pangan dari segi kualitas, mutu, dan keamanannya.

Ketiga, pola konsumsi masyarakat Indonesia di masa sekarang sedang melalui transisi dari tradisional menjadi lebih modern. Iklan-iklan promosi yang umumnya bersifat konsumtif menggambarkan makanan modern atau siap saji sebagai makanan yang menarik, sehingga tidak menutup kemungkinan jika lama kelamaan masyarakat Indonesia akan meninggalkan makanan yang dianggap tradisional atau lokal. Tantangan terakhir adalah persaingan permintaan atas komoditas pangan. Pada kenyataannya, bukan hanya manusia yang membutuhkan pangan, melainkan makhluk hidup lain seperti ternak. Ditambah lagi, kini sedang dikembangkan sumber energi yang memanfaatkan pangan sebagai bahan baku (*biofuel*). Semakin banyak sektor yang membutuhkan bahan baku pangan, maka permintaan pangan akan ikut mengalami peningkatan.<sup>29</sup>

Jurnal kedua yang akan dikaji berjudul "Sumber Daya Pangan Bahari dalam Perspektif Sejarah" yang ditulis oleh Singgih Tri Sulistiyono. Dalam jurnal tersebut, Sulistiyono berpendapat bahwa ketika berbicara mengenai ketahanan pangan, masyarakat hanya mengacu kepada sumber makanan dari sektor agrikultur seperti beras, sayuran, kacang-kacangan, dan sebagainya. Pemahaman tersebut kemudian diaplikasikan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait

---

<sup>29</sup> Ibid hlm 132.

permasalahan pangan. Pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan perhatian yang proporsional kepada sektor kelautan dan perikanan.<sup>30</sup> Masyarakat Indonesia sekiranya tidak mengingat bahwa pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan sebagai bahan pangan sudah dilakukan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala.

Menurut Sulistiyono, terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada sektor kelautan dan perikanan. Pertama, Sulistiyono mengamati kecenderungan terjadinya penurunan tren sektor pertanian.<sup>31</sup> Kedua, pola konsumsi yang bertumpu pada beras menghambat diversifikasi bahan pangan. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras merupakan hal yang memprihatinkan karena kelangkaan beras telah menjadi sumber permasalahan konflik-konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia.<sup>32</sup> Alasan terakhir adalah kecenderungan naiknya jumlah penduduk menuntut peningkatan produksi bahan pangan, terutama beras.<sup>33</sup> Meningkatnya jumlah penduduk secara otomatis meningkatkan tanggung jawab negara untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyatnya, sehingga Indonesia harus menemukan strategi dan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Sulistiyono juga membahas tantangan yang dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan dalam memenuhi ketahanan pangan. Tantangan pertama datang dari modernisasi peralatan tangkap ikan di Indonesia. Indonesia masih mengalami

---

<sup>30</sup> Singgih Tri Sulistiyono, "Sumber Daya Pangan Bahari dalam Perspektif Sejarah," *HUMANIKA* vol. 15 no. 9 (Januari, 2012) hlm. 1-20.

<sup>31</sup> Ibid hlm. 2.

<sup>32</sup> Ibid hlm. 3.

<sup>33</sup> Ibid hlm. 4.

ketertinggalan dalam bidang infrastruktur dan teknologi. Mayoritas nelayan di Indonesia masih menggunakan peralatan tradisional dalam kegiatan menangkap ikan sehari-hari. Tentu saja, hal ini menurunkan daya saing nelayan Indonesia jika harus berhadapan dengan nelayan dari negara lain yang memiliki peralatan lebih canggih. Oleh sebab itu, perlu dilakukan modernisasi melalui inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam menangkap ikan. Kemudian, tantangan selanjutnya juga datang dari teknologi pengawetan dan penyajian produk hasil sektor kelautan dan perikanan yang kurang menarik<sup>34</sup>. Untuk mengikuti tren permintaan pasar, diperlukan kreativitas untuk mengubah pola penyajian ikan agar dapat menarik perhatian konsumen.

Sulistiyono berpendapat bahwa sumber daya bahari negara Indonesia belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengabaian terhadap sektor kelautan dan perikanan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk mengembangkan potensi mereka dalam memanfaatkannya sebagai sumber ekonomi dan modal dasar untuk kesejahteraan.

Jurnal terakhir yang akan dikaji oleh penulis berjudul "Blue Economy and Competing discourses in International Ocean Governance" yang membahas konsep Ekonomi Biru. Terdapat empat diskursi dalam konsep ekonomi biru, yaitu; Laut sebagai modal sumber daya alam; Laut sebagai *good business* atau bisnis yang baik; Laut sebagai integral bagi Negara Berkembang Kepulauan Kecil di wilayah Pasifik; dan laut sebagai penopang aktivitas perikanan berskala kecil.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid hlm. 16.

<sup>35</sup> J.J Silver, L.M. Campbell, L.W. Fairbanks, dan R. L. Gruby, "Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance," *Journal of Environment & Development* 24 (2) (2015): hlm. 135-160.

Sebagai modal sumber daya alam, spesies yang membentuk infrastruktur laut masih belum mendapatkan perawatan yang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman manusia mengenai tata kelola fungsi ekosistem kelautan. Konsep Ekonomi Biru dalam konteks ini ditujukan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam laut yang benar.

Diskursi kedua dalam konsep Ekonomi Biru adalah laut sebagai *good business*. Dalam diskursus ini, wilayah laut dan pesisir digambarkan sebagai fondasi bagi kehidupan ekonomi jangka panjang. Diskursi ketiga adalah laut sebagai integral bagi Negara Berkembang Kepulauan Kecil di Wilayah Pasifik atau yang dikenal sebagai SIDS. Pada diskursi ini, konsep Ekonomi Biru menekankan upaya negara SIDS untuk mengurangi jumlah eksploitasi ikan serta mencegah destruksi terhadap sumber daya alam laut. Terakhir, membentuk sistem perairan yang dapat menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Diskursi terakhir adalah laut sebagai penopang aktivitas perikanan berskala kecil. Konsep Ekonomi Biru menekankan pentingnya melakukan promosi laut sebagai pusat kehidupan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas pesisir.<sup>36</sup>

Ada tiga faktor utama yang menjadi motivasi bagi penggunaan konsep Ekonomi Biru untuk tata kelola sumber daya alam laut global. Pertama, meningkatnya urgensi untuk membuat peraturan sumber daya alam laut secara global. Kedua, sebagian besar lautan berada di luar yurisdiksi negara manapun, sehingga diperlukan sebuah ketentuan supranasional yang dapat diaplikasikan kepada wilayah-wilayah laut tersebut. Ketiga, banyak negara maupun perusahaan

---

36 J. Dryzek, 2006, *The Politics of the earth: Environmental discourses* (2nd ed.) (New York: Oxford University Press). Hlm. 123-140.

multinasional yang memiliki kepentingan tinggi terhadap sumber daya alam laut. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ketentuan untuk menjaga sumber daya alam laut dari kegiatan yang bersifat eksploitatif, sekaligus mencegah konflik perebutan wilayah kelautan tertentu.<sup>37</sup>

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis, diperlukan kerangka teori atau konsep dari ilmu Hubungan Internasional yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kerangka teori ini akan dijadikan landasan berpikir untuk menganalisa isu yang dibawa pada penulisan penelitian ini. Konsep kepentingan nasional, indikator ketahanan pangan dalam target SDGs 2030 Poin ke-2 dan 14 menurut FAO, dan pilar utama ketahanan pangan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dijadikan sebagai landasan untuk membahas upaya Indonesia dalam mencapai target SDGs poin ke-2 dan 14 terkait ketahanan pangan berkelanjutan.



*Gambar 1.5. 1 Operasionalisasi Kerangka Pemikiran*

<sup>37</sup> Ibid hlm. 137.

### a. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep penting dalam Ilmu Hubungan Internasional, mengingat setiap negara di dunia akan selalu berupaya untuk memenuhi kepentingan nasional mereka masing-masing. Kepentingan tersebut meliputi seluruh elemen dalam negara seperti politik, keamanan, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Salah satu pencetus konsep kepentingan nasional adalah Hans Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations*. Menurut pandangan Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara adalah kekuatan. Semakin besar kekuatan suatu negara, maka negara dianggap mampu melindungi kepentingan nasional mereka. Oleh sebab itu, seluruh usaha untuk mendapatkan, mempertahankan, dan ekspansi kekuatan adalah justifikasi negara melindungi kepentingan nasional mereka.<sup>38</sup>Selain itu, Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional adalah cerminan dari keputusan yang diambil oleh negara, sehingga konsep kepentingan nasional akan memberi pengaruh besar dalam pembuatan dan implementasi strategi suatu negara.<sup>39</sup> Oleh sebab itu, analisa terhadap kepentingan nasional dapat menjelaskan perilaku suatu negara dalam dunia internasional.<sup>40</sup>

Menurut Morgenthau, ada tujuan yang diakui sebagai kepentingan fundamental secara global. Tujuan yang dimaksud seringkali disebut sebagai tujuan vital bagi negara, dimana negara akan melakukan apapun demi mencapai tujuan fundamentalnya. Salah satu contoh tujuan yang bersifat vital bagi negara adalah

---

<sup>38</sup> Hans J. Morgenthau, 2006, *Politics Among Nations* (New York: Alfred A. Knopf), hlm. 145.

<sup>39</sup> Zongyi Liu, 2014, "The Concept of National Interests," *China's Diplomacy* hlm. 121-189.

<sup>40</sup> Joseph Frankel, 1979, *International Relations in a Changing World* (London: Oxford University Press), hlm. 85.



mewujudkan keamanan negara serta memberikan perlindungan bagi warga, nilai-nilai, dan budaya negara tersebut.<sup>41</sup>

Selain Morgenthau, konsep kepentingan nasional juga dibahas oleh penulis Robert E. Osgood dalam bukunya yang berjudul *Ideas and Self Interest in America's Foreign Relations*. Pada buku tersebut, Osgood berpendapat bahwa kepentingan nasional dinilai sebagai keuntungan bagi sebuah negara. Osgood juga menyatakan bahwa motif dari kepentingan nasional adalah egoisme negara untuk mencapai kesejahteraan bagi negara tersebut.<sup>42</sup> Konsep kepentingan nasional menurut Osgood adalah bentuk negara memastikan *survival* negara dalam keutuhan teritorial, kemerdekaan politik, serta mempertahankan keberadaan pemerintah dalam negara.<sup>43</sup> Hingga saat ini, kepentingan nasional masih menjadi salah satu alasan utama negara memilih untuk terlibat dalam dunia internasional. Kepentingan nasional menunjukkan aspirasi negara-negara yang diaplikasikan melalui pembuatan program dan kebijakan, baik dalam ranah domestik maupun internasional.<sup>44</sup>

#### **b. Pilar Ketahanan Pangan Global Berdasarkan *World Food Conference* (1996)**

Ketahanan pangan merupakan suatu isu yang bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan memerlukan ukuran yang komprehensif serta melibatkan serangkaian indikator.<sup>45</sup> Berdasarkan *World Food*

---

<sup>41</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (New York: Alfred A. Knopf, 2006)

<sup>42</sup> Robert E. Osgood, 1953, *Ideals and Self interest in America's foreign Relations* (University of Chicago), hlm. 10.

<sup>43</sup> Ibid hlm. 5-6.

<sup>44</sup> Joseph Frankel, 1979, *International Relations in a Changing World* (London: Oxfors University Press), hlm. 86.

<sup>45</sup> Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2018, "Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018," diakses 18 September 2019 dari

*Conference* yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1996, terdapat empat dimensi dalam ketahanan pangan yaitu: (i) ketersediaan pangan; (ii) akses pangan; (iii) pemanfaatan pangan; dan (iv) stabilitas pangan. Di Indonesia, keempat dimensi tersebut diadopsi oleh Pemerintah sebagai tiga pilar utama ketahanan pangan nasional yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Ketiga pilar tersebut kemudian digunakan sebagai tolak ukur Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun tiga pilar utama ketahanan pangan nasional meliputi: (i) subsistem ketersediaan pangan; (ii) subsistem keterjangkauan pangan; (iii) subsistem konsumsi atau pemanfaatan hasil produksi.

#### **i. Subsistem Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan (*food availability*) dalam konteks ini merujuk pada keberadaan pangan secara fisik. Pilar ketersediaan pangan memiliki korelasi dengan persediaan pangan yang didapatkan melalui produksi, distribusi, maupun pertukaran. Ketersediaan pangan dalam level nasional menitikberatkan pada produksi pangan domestik melalui swasembada pangan, guna mencapai ketahanan pangan. Namun, ketahanan pangan juga dapat dipenuhi dari hasil produksi luar negeri apabila swasembada tidak memungkinkan. Subsistem ketersediaan pangan diibaratkan sebagai subsistem hulu dalam ketahanan pangan.<sup>46</sup> Subsistem ini tidak hanya meliputi aspek produksi, melainkan elemen-elemen lain yang relevan dalam mewujudkan ketersediaan pangan selain produksi domestik. Ketersediaan pangan

---

<http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202018.pdf>.

<sup>46</sup> Bambang Hendro Sunarminto, 2010, *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional* (Yogyakarta: BPF) hlm. 73.

dapat berasal dari 4 (empat) sumber yaitu produksi domestik, impor, cadangan pangan, dan bantuan pangan.<sup>47</sup> Untuk menunjang ketahanan pangan dari subsistem ketersediaan pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian membuat arahan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal, serta memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.<sup>48</sup>

## ii. Subsistem Keterjangkauan Pangan

Subsistem keterjangkauan pangan meliputi dua elemen penting yang diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, yaitu aspek sistem distribusi dan aspek akses terhadap pangan. Tanpa adanya sistem distribusi dan akses yang memadai, kondisi ketahanan pangan yang menyeluruh tidak akan dapat tercapai. Aspek distribusi pangan dalam subsistem keterjangkauan pangan meliputi serangkaian aktivitas yang mendukung penyaluran dan persebaran pangan secara merata dan menyeluruh ke seluruh wilayah di Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur dalam aspek distribusi, antara lain<sup>49</sup>:

---

<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup> Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2018, "Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018," diakses 19 September 2019 dari <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202018.pdf>

<sup>49</sup> Bambang Hendro Sunarminto, *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional* (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 75.

- Sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, pengangkutan, serta fasilitas lain yang mendukung fungsi distribusi pangan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.
- Lembaga pemasaran yang berperan dalam mempersingkat mata rantai pemasaran produk-produk pangan, sehingga mampu menekan harga jual bahan pangan yang harus dibayar oleh masyarakat. Tanpa adanya lembaga pemasaran formal, proses distribusi pangan akan memakan waktu yang lebih panjang karena harus melewati lembaga pemasaran informal. Akibatnya, harga yang diterima oleh konsumen akhir dapat menjadi sangat tinggi.
- Stabilitas pasokan dan harga yang dapat menunjang kontinuitas distribusi bahan pangan. Sistem distribusi pangan yang lemah dapat berpengaruh negatif terhadap harga bahan pangan.

Apabila dianalisis dari segi akses terhadap pangan, kebutuhan pangan masyarakat dikatakan terjamin ketika seluruh masyarakat memiliki sumber daya yang cukup untuk pangan yang layak dan bergizi. Terdapat tiga macam akses pangan yang mempengaruhi subsistem keterjangkauan pangan yaitu:

- Akses ekonomi, berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh bahan pangan dari segi ekonomis (uang). Akses ekonomi meliputi pendapatan, kesempatan kerja, dan harga dari pangan itu sendiri. Banyaknya kesempatan kerja akan berpengaruh pada semakin besarnya pendapatan individu, sehingga memiliki akses ekonomi yang lebih besar dari individu lain. Sebaliknya, faktor harga pangan memiliki perbandingan terbalik dengan akses ekonomi individu. Harga pangan

yang tinggi akan menyebabkan akses masyarakat terhadap pangan semakin kecil.

- Akses fisik, berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana distribusi. Kondisi sarana dan prasarana yang mendukung akan memperbesar kesempatan individu untuk mengakses pangan yang memadai.
- Akses sosial memiliki keterkaitan dengan preferensi individu/rumah tangga terhadap pangan. Preferensi dalam konteks ini tidak lepas dari tingkat pendapatan dan pengetahuan individu/rumah tangga tersebut.

Untuk menjamin pilar keterjangkauan pangan terpenuhi, pemerintah dapat memberikan bantuan pangan, atau melakukan penanganan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan gizi agar mereka bisa menikmati pangan.<sup>50</sup>

### **iii. Subsistem Konsumsi**

Subsistem konsumsi atau pemanfaatan mengacu kepada aspek sosio-ekonomi individu atau rumah tangga dalam ketahanan pangan. Pola konsumsi pangan wajib untuk memenuhi kaidah-kaidah keamanan, keragaman, serta kesehatan atau kandungan gizi.<sup>51</sup> Memenuhi kaidah keragaman memiliki arti bahwa masyarakat tidak hanya mengkonsumsi satu jenis pangan saja, sehingga potensi ketergantungan terhadap satu jenis sumber pangan dapat dicegah. Oleh sebab itu, diversifikasi pangan menjadi salah satu rencana strategis yang berperan dalam perwujudan ketahanan pangan. Manfaat dari diversifikasi pangan adalah membuat daerah-daerah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri,

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 75.

<sup>51</sup> Lioba Weingärtner, 2004, "Food and Nutrition Security Assessment Instruments and Intervention Strategies," *International Training Course Background Paper* No (1) hlm. 3-27.

sehingga tidak perlu bergantung pada impor satu jenis sumber pangan tertentu. Ditambah lagi, produksi lokal juga menghasilkan akses pangan yang lebih murah dan beragam dibandingkan harus mendatangkan sumber pangan dari daerah lain.

Selain akses keragaman, tercapainya ketahanan pangan nasional juga perlu mempertimbangkan aspek kesehatan atau kandungan gizi. Pemenuhan aspek kesehatan atau kandungan gizi berkaitan dengan pangan yang memenuhi kebutuhan nutrisi manusia agar dapat bertumbuh kembang secara normal. Kandungan gizi dalam pangan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan, mengingat ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Sayangnya, pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi oleh karbohidrat, sedangkan konsumsi bahan pangan hewani masih jauh dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa bahan pangan hewani merupakan sumber pangan yang eksklusif bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah. Hal ini tercerminkan pada harga bahan pangan hewani yang masih terbilang mahal.

Dari segi keamanan, pangan yang diterima masyarakat harus bebas dari racun dan zat berbahaya lainnya. Pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak boleh menimbulkan dampak buruk bagi tubuh, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini perlu ditekankan mengingat marak beredar makanan-makanan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti formalin, boraks, serta pengawet lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Hendro Sunarminto, 2010, *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional* (Yogyakarta: BPF) hlm. 71.

### **c. Indikator Ketahanan Pangan dalam Target SDGs Poin ke-2 dan 14 Menurut FAO**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan dari target SDGs 2030 adalah memastikan ketahanan pangan dan gizi bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Untuk menganalisis sejauh mana upaya Indonesia dalam mewujudkan ketiga pilar ketahanan pangan, target SDGs 2030 dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan guna menyelaraskan persepsi pembangunan nasional dengan target-target yang hendak dicapai dalam ranah global.

Sebagai lembaga di bawah PBB yang bergerak dalam bidang pangan, FAO telah mengklasifikasikan indikator-indikator yang secara spesifik ditujukan untuk mengawasi perkembangan negara-negara dalam mewujudkan target SDGs 2030 terkait ketahanan pangan. Penulis akan menggunakan indikator pemenuhan target SDGs 2030 yang berada dibawah perwalian FAO, yaitu poin ke-2 dan 14 yang berkaitan dengan pemenuhan ketahanan pangan melalui sektor kelautan dan perikanan.

#### **i. Poin *Zero Hunger***

Saat ini, dunia mengalami degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim drastis menyebabkan tingginya resiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan, sehingga memberi tekanan terhadap sumber daya alam yang menjadi tumpuan manusia. Hasil pertanian menjadi tidak menentu menuntut penduduk pedesaan untuk bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mencari

penghidupan yang lebih baik. Ditambah lagi, keadaan pangan yang buruk menyebabkan nyawa jutaan anak-anak terancam akibat malnutrisi.<sup>53</sup> Untuk menanggulangi dampak buruk tersebut, target SDGs 2030 poin ke-2 yaitu *Zero Hunger* hadir sebagai bentuk dedikasi global untuk memberantas kerawanan pangan dan malnutrisi.

Target SDGs 2030 poin ke-2 mencakup beberapa indikator kesuksesan yang perlu dicapai sebelum tahun 2030. Indikator ini dapat dimanfaatkan oleh negara-negara untuk mengawasi kinerja pemberantasan kelaparan nasional. Indikator yang pertama berkaitan dengan estimasi populasi global yang masih mengalami kekurangan gizi. Estimasi didapatkan melalui penelitian mengenai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk beraktivitas sehari-hari. Indikator ini memberikan wawasan pada negara-negara terkait kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan malnutrisi dan kekurangan gizi.<sup>54</sup> Dengan mengacu kepada indikator tersebut, diharapkan bahwa setiap negara mampu mengukur sejauh mana upaya yang telah dilakukan untuk mengakhiri kelaparan dan memastikan bahwa setiap manusia memiliki akses terhadap pangan yang berkelanjutan.

## ii. Poin *Life Below Water*

Target SDGs 2030 poin ke-14 yaitu “*conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development,*” memiliki relevansi langsung terhadap sektor perikanan dan kelautan. Poin ini menyatakan bahwa sektor perikanan laut dan budidaya dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan

---

<sup>53</sup> UN, “Goal 2: Zero Hunger,” diakses 29 Agustus 2019 dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/>

<sup>54</sup> UN, “SDG Indicator 2.1.1 – Prevalence of undernourishment,” diakses 19 September 2019 dari <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/211/en/>



dan nutrisi, serta memastikan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesuksesan target SDGs 2030 poin ke-14 terkait ketahanan pangan diukur dari beberapa indikator. Pertama, mengukur tingkat keberlanjutan penangkapan ikan dari segi kuantitas. Sektor perikanan memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan global. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat berpotensi menyebabkan penangkapan ikan berlebih yang kemudian dapat merusak fungsi ekosistem sekaligus merusak keanekaragaman hayati. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, persediaan ikan yang ada di laut harus selalu dijaga agar terus sesuai dengan level produksi *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Bersama dengan indikator SDG poin ke-14 lain, indikator ini menekankan komitmen negara-negara dalam membuat kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah jumlah persediaan ikan berada dibawah level MSY.<sup>55</sup>

Indikator kedua dalam SDG poin ke-14 berkaitan dengan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Pada tahun 2017, sebanyak 79% dari total anggota negara PBB mengidentifikasi IUU *Fishing* sebagai salah satu permasalahan utama dalam menciptakan sektor perikanan berkelanjutan. Untuk memberantas praktik yang merugikan tersebut, indikator ini berfokus pada upaya negara-negara dalam mengimplementasikan regulasi nasional yang efektif terkait praktik IUU *Fishing*.<sup>56</sup>

Indikator selanjutnya adalah menjadikan sektor perikanan berkelanjutan sebagai salah satu kontributor PDB bagi negara-negara kepulauan kecil, negara

---

<sup>55</sup> UN, "SDG Indicator 14.4.1 – Fish Stocks Sustainability," diakses 19 September 2019 dari <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/14.4.1/en/>

<sup>56</sup> UN, "SDG Indicator 14.6.1 – Illegal, unreported, unregulated fishing," diakses 19 September 2019 dari <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/14.6.1/en/>

kurang berkembang, dan negara-negara lainnya. Sektor perikanan laut dan budidaya menawarkan peluang besar untuk memberantas kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Sayangnya, penangkapan ikan berlebih dan IUU *Fishing* menjadi ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem laut. Oleh sebab itu, organisasi FAO akan menggunakan PDB untuk mengukur perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber pencaharian utama.<sup>57</sup> Diharapkan bahwa pada tahun 2030, negara-negara kepulauan kecil serta negara kurang berkembang dapat memanfaatkan sektor perikanan berkelanjutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Indikator terakhir adalah memastikan bahwa pelaku perikanan berskala kecil memiliki akses terhadap ketahanan pangan dan pemberantasan kemiskinan. Indikator ini menganalisis perkembangan negara-negara dalam mengimplementasi paduan yang mengatur sektor perikanan berskala kecil yang berkelanjutan. Tujuan dari indikator ini adalah melindungi hak akses bagi pelaku perikanan berskala kecil, sekaligus dalam memberantas IUU *Fishing*.<sup>58</sup>

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian riset yang deskriptif dan analisis

---

<sup>57</sup> UN, "SDG Indicator 14.7.1 – Value added of sustainable fisheries," diakses 19 September 2019 dari <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/14.7.1/en/>

<sup>58</sup> UN, "SDG Indicator 14.b.1 – Access rights for small-scale fisheries," diakses 18 September 2019 dari <http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/14b1/en/>

menggunakan landasan teori dan bermuara pada kesimpulan. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam metode penelitian kualitatif adalah John Creswell. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>59</sup> Metode kualitatif juga digunakan untuk meneliti lebih dalam fenomena sosial yang menekankan kepada hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>60</sup> Creswell berpendapat bahwa pengumpulan data kualitatif dapat berupa dokumen pribadi atau umum, foto, serta laporan-laporan lain yang dapat menjelaskan penelitian tersebut.<sup>61</sup>

Penelitian ini juga akan menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia nyata, baik pada masa sekarang maupun masa lampau.<sup>62</sup>

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif terdiri dari beberapa cara, contohnya studi kepustakaan dan bahan audio-visual.<sup>63</sup> Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen publik seperti koran, laporan resmi dari pemerintah, maupun dokumen privat seperti jurnal pribadi, surat, dan

---

<sup>59</sup> John W. Creswell, 2007, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 2nd edition, (California: Sage Publications) hlm. 20.

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 20.

<sup>61</sup> John W. Creswell, 2007, *Mixed Method Research* (California: Sage Publications), hlm. 29.

<sup>62</sup> Sudjana dan Ibrahim, 1989, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Sinar Baru).

<sup>63</sup> John W. Creswell, 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications), hlm. 179-180.

surat elektronik. Kemudian, teknik pengumpulan data melalui bahan audio-visual terdiri dari data-data dalam bentuk foto, objek seni, video, atau suara.<sup>64</sup>

Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif, yaitu studi dokumen dan bahan audio-visual. Teknik studi dokumen dan bahan audio-visual akan didapat dari data pemerintah, laporan resmi organisasi internasional seperti PBB, FAO, dan UNDP, laporan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, artikel, dan jurnal lain yang mendukung. Sumber jurnal akan diperoleh dari perpustakaan kementerian, jurnal spesifik yang membahas industri kelautan dan perikanan di Indonesia, terutama yang membahas kegunaan sektor kelautan dan perikanan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Sedangkan, data sekunder akan menggunakan berita-berita yang berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan di Indonesia, serta pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. Berita didapat melalui situs resmi seperti: Portal berita Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau media cetak maupun yang dapat diakses melalui situs daring.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab. Bab I, yang berjudul pendahuluan, akan membahas latar belakang dari urgensi pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan target SDGs 2030 terkait ketahanan pangan. Latar belakang masalah akan diikuti dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian literatur dan kerangka pemikiran, serta metode penelitian yang akan digunakan. Kemudian, bab kedua akan membahas kondisi umum ketahanan pangan global dan ketahanan pangan di Indonesia.

---

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 179-180.

Bab II akan menjelaskan profil sektor kelautan dan perikanan Indonesia, beserta dengan potensi dan tantangan yang harus dihadapi dalam hal perwujudan ketahanan pangan. Bab ini juga akan membahas komitmen Presiden Joko Widodo dalam memanfaatkan sektor kelautan dan perikanan yang diselaraskan dengan visi dan misi pemerintahannya.

Bab III akan membahas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan. Pembahasan akan difokuskan pada kebijakan dan program yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam urusan kelautan dan perikanan Indonesia. Setelah itu, penulis akan menganalisis sejauh mana Pemerintah Indonesia telah berhasil memanfaatkan sektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Keberhasilan tersebut diukur menggunakan indikator ketahanan pangan nasional dan indikator ketahanan pangan dalam target *Sustainable Development Goals* 2030 poin ke-2 (*zero hunger*) dan 14 (*life below water*).

Bab IV akan berisi kesimpulan penulis terkait analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bab keempat juga memuat saran ataupun rekomendasi yang dirumuskan dari hasil penelitian penulis.